

Program Vaksinasi Nasional: Strategi Komunikasi Dokter di Sumatera Barat



CrossMark

Alwan Husni Ramdani¹, Rizky Abdul Azis², Renanda Putri³, Sania Majida⁴
^{1,2,3,4}*Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*

ABSTRACT

Covid-19 vaccination has been an important issue in West Sumatra. Placed second as the lowest level of Covid-19 vaccine acceptance in Indonesia, West Sumatra faces various rejections in the implementation of vaccination programs amidst this pandemic. To increase public participation, doctors have an important role in developing and implementing communication strategies. Through Lasswell's communication, researchers examined how doctors execute communication strategies in vaccination programs in West Sumatra. The research was conducted through a qualitative approach with a case study strategy. This study reveals that doctors use a religious and socio-cultural approach in educating the public about information about the Covid-19 vaccine through various media. The two approaches were chosen by doctors due to their attachment to cultural and religious values. Further research is needed to find out the impact of doctors' communication strategies increasing community participation in the Covid-19 vaccine program in West Sumatra.

ABSTRAK

Vaksinasi Covid-19 menjadi persoalan penting yang dihadapi oleh provinsi Sumatera Barat. Menempati peringkat kedua dengan tingkat penerimaan vaksin Covid-19 terendah di Indonesia, Sumatera Barat menghadapi berbagai penolakan dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional di masa pandemi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi, dokter memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi. Melalui model komunikasi Lasswell (who says what in which channel to whom), peneliti ingin mengkaji bagaimana dokter di Sumatera Barat menjalankan strategi komunikasi dalam program vaksinasi nasional. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dokter menggunakan pendekatan agama dan sosial budaya dalam mengedukasi informasi seputar vaksin Covid-19 kepada masyarakat melalui berbagai media. Dua pendekatan tersebut dipilih karena masyarakat Sumatera Barat lekat dengan nilai-nilai budaya dan agama. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan dua pendekatan yang digunakan dokter dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program vaksin Covid-19 di Sumatera Barat.

CONTACT

Alwanhusni@upi.edu

KEYWORDS

Strategi Komunikasi,
Komunikasi Kesehatan,
Penolak Vaksin

Received: 15/08/2022

Revised: 10/10/2022

Accepted: 25/11/2022

Online: 14/12/2022

Published: 15/12/2022



Risenologi is licenced
under a Creative
Commons Attribution 4.0
International Public
Licence (CC-BY 4.0)

PENDAHULUAN

Vaksin menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di berbagai belahan dunia untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia, selain mengeluarkan kebijakan pembatasan aktifitas diluar ruangan, juga mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Upaya tersebut guna meningkatkan pembentukan *herd immunity* sehingga akan menahan laju peningkatan penularan virus Covid-19, (Nurdiana et al., 2021). Akan tetapi pada prosesnya semacam ada resistensi masyarakat terhadap pemberian vaksin yang disinyalir sebagai penyebab mandetnya realisasi vaksinasi nasional. Mulai dari sikap ketidakpercayaan terhadap vaksinasi bagi sebagian kelompok masyarakat, narasi soal vaksin yang tendensius negatif serta narasi-narasi soal bisnis vaksin, (Habibah Gaffar, 2022). Sehingga membuat proses program vaksinasi Covid-19 sangat rendah.

Salah satu provinsi yang masih rendah partisipasi vaksinnya adalah masyarakat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam jajaran provinsi dengan tingkat vaksinasi Covid-19 yang terendah di Indonesia. Survei yang dilakukan secara daring di Indonesia oleh ITAGI, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan RI pada September 2020 menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Barat menempati posisi kedua dengan tingkat penerimaan vaksin Covid-19 terendah sebesar 47% setelah provinsi Aceh. Dari 115.000 responden di 34 provinsi di Indonesia yang mengikuti survei tersebut, 16.686 responden menolak untuk menerima vaksin Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa

faktor, seperti keamanan vaksin (30%), tingkat efektifitas vaksin (22%), kepercayaan terhadap vaksin (13%), efek samping yang akan ditimbulkan (12%), dan agama (8%), (Kementerian Kesehatan RI et al., 2020).

Data terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Barat per Juni 2021 juga menunjukkan angka capaian vaksinasi Covid-19 yang masih rendah sebesar 23% dari sekitar 870 ribu orang yang mendapat vaksinasi tahap I dan tahap II, (Harlina, 2021). Rendahnya angka vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat ini dapat disebabkan dari kurangnya kepercayaan masyarakat etnis Minang terhadap keamanan dan kehalalan vaksin, (Lembaga Survei Indonesia, 2021).

Penolakan vaksin di provinsi Sumatera Barat ini pernah terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia. Di tahun 2018, tingkat capaian imunisasi Measles Rubella (MR) Sumatera Barat mencapai 41,61% di bawah tingkat realisasi nasional sebesar 72,75% yang membuat Sumatera barat menjadi provinsi dengan tingkat capaian imunisasi MR terendah di Indonesia setelah provinsi Aceh, (Candra, 2019). Keraguan masyarakat terhadap pemberian imunisasi dari sudut pandang agama, (Hendra, 2019) dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksin MR yang di dalamnya mengandung babi menjadi faktor yang menyebabkan tingkat capaian imunisasi rendah di provinsi Sumatera Barat, (Kuwardo, 2018).

Ketidakpercayaan pada vaksinasi, kesalahpahaman dalam memahami tingkat keparahan infeksi virus Covid-19, dan preferensi untuk kekebalan alami diasosiasikan dengan keraguan untuk menerima vaksinasi yang lebih besar. Beberapa survei yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah, pengangguran, berusia muda, serta berasal dari etnis dan ras minoritas cenderung memiliki keraguan lebih besar untuk divaksinasi, (Finney Rutten et al., 2021).

Serupa dengan survei tersebut, di Indonesia, penelitian berjudul "*Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia*" mengungkapkan kelompok pensiunan memiliki penerimaan vaksin Covid-19 yang rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai pegawai sipil. Para pensiunan yang masuk ke dalam kelompok lansia ini memiliki mobilitas yang lebih rendah dan mendapat lebih sedikit paparan informasi terkait Covid-19 yang sebagian besar disebarkan melalui media sosial maupun media daring, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan vaksin mereka, (Harapan et al., 2020).

Selain kelompok pensiunan atau lansia, masyarakat kalangan muslim, kelompok perempuan, kelompok usia muda, masyarakat pedesaan, serta kelompok masyarakat berpendidikan dan berpendapatan rendah memiliki kecenderungan lebih rendah untuk divaksin. Hasil temuan dari survei yang dilakukan oleh Indikator pada 1-3 Februari 2021 memperlihatkan bahwa kelompok muslim lebih resisten terhadap vaksin karena kehalalan vaksin adalah hal utama yang harus dipenuhi. Sebesar 81.9% warga bersedia untuk divaksin jika kehalalan vaksin tersebut sudah dibuktikan, (Indikator Politik Indonesia, 2021). Sebuah temuan riset menunjukan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang menolak terhadap program vaksin. Hal tersebut muncul didasari oleh munculnya anggapan bahwa informasi Pemerintah tidak transparan, keraguan akan status halal dan haram vaksinasi, dan keinginan untuk mewujudkan imajinasi moral menjadi seorang Muslim yang baik dan taat terhadap ajaran agama, membuat internet dan media sosial menjadi sumber yang dipercaya dalam menjawab pertanyaan dan keraguan sebagian Muslim terhadap vaksinasi, dan akhirnya memengaruhi sebagian kelompok Muslim di Indonesia untuk menolak vaksinasi, (Rahayuwati, 2021).

Penolakan vaksin Covid-19 yang terjadi saat ini tentunya akan memberikan dampak ke berbagai sektor kehidupan. Pemberian vaksin bertujuan untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu untuk mencegah terpapar dari penyakit tersebut atau hanya mengalami sakit yang ringan. Sebaliknya, seseorang yang tidak divaksin tidak akan memiliki kekebalan khusus terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, (Kemenkes RI, 2021). Selain dari sisi kesehatan, penolakan vaksin akan menghambat pemulihan ekonomi. Seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan RI bahwa pandemi Covid-19 ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1.356 triliun di tahun 2020, (Victoria, 2021).

Terhambatnya kegiatan ekonomi di masa pandemi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan rumah tangga. Survei yang dilakukan SMERU, PROSPERA, UNDP, dan UNICEF terhadap 12.216 sampel rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia mengungkapkan sebesar 74,3% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan pada bulan Januari 2020. Banyak rumah tangga jatuh miskin atau rentan terhadap kemiskinan setelah pandemi yang bahkan sebelumnya berada di posisi aman dan menengah secara ekonomi, (UNICEF et al., 2021). Oleh karena itu, adanya gerakan vaksinasi massal yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengembalikan produktivitas kegiatan ekonomi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam rangka mendukung program vaksinasi Covid-19, diperlukan strategi komunikasi yang dilakukan tenaga kesehatan untuk masyarakat dengan informasi seputar vaksin Covid-19. Vaksinasi sebagai bentuk pencegahan dari

paparan virus sangat penting dilakukan di masa pandemi. Sebagai tenaga kesehatan, dokter memiliki peran besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dokter perlu terlibat dalam promosi program vaksinasi (Yuliyanti et al., 2018). Hal tersebut didukung dengan hasil survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia yang mengungkapkan sebesar 57% masyarakat percaya kepada tenaga kesehatan dan staf medis dalam memberikan edukasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah masyarakat bersedia vaksinasi atau sebaliknya, (Kementerian Kesehatan RI et al., 2020).

Pada hakikatnya, strategi komunikasi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, (Littlemore, 2003). Lebih lanjut strategi komunikasi yang baik dalam mencapai tujuan harus bersifat maksimal dalam berkomunikasi, berarti berbicara tentang strategi komunikasi terdapat individu yang memulai interaksi, lalu pesan dikirim kepada individu yang lain melalui saluran dan mengharapkan umpan balik sebagai evaluasi dari tujuan mengapa komunikasi itu dilakukan. Dari unsur-unsur ini, strategi komunikasi dipilih dapat berfungsi efektif. Tujuan komunikasi dapat disepakati ketika individu memahami arti pesan dari individu lain dan perhatian juga menerima pesan sepenuhnya, (Husain, 2020). Dalam dunia kesehatan, komunikasi diartikan sebagai seni dan teknik untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan memotivasi individu atau kelompok tentang masalah kesehatan. Komunikasi kesehatan ini mencakup studi dan penggunaan strategi komunikasi, yaitu rencana yang diadopsi oleh pemberi edukasi dan layanan kesehatan untuk memberikan informasi dan mempengaruhi orang dengan harapan dapat mengubah atau mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih sehat (Nkanunye & Obiechina, 2017). Terdapat beberapa strategi komunikasi kesehatan menurut Noar, Benac, dan Haris (2007), yaitu melalui kampanye, advokasi hiburan dan media, teknologi baru, serta komunikasi interpersonal.

Kampanye komunikasi kesehatan secara langsung memberikan edukasi yang dapat menjangkau khalayak yang besar untuk meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan mereka melalui media massa, internet, dan media sosial. Lebih lanjut, penggunaan strategi berbasis penelitian dinilai efektif dalam strategi komunikasi kesehatan karena budaya, latar, dan bahasa dalam masyarakat menjadi prioritas, (Nkanunye & Obiechina, 2017).

Penelitian mengenai strategi komunikasi yang dilakukan dokter dalam program vaksinasi Covid-19 belum banyak dilakukan sehingga tema tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun kajian terkait strategi komunikasi dalam program vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu sudah dibahas dalam banyak penelitian, tentu menggambarkan kondisi dan hasil yang berbeda tidak seperti pandemi yang saat ini melanda dunia sehingga penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Puskesmas Haur Gading, provinsi Selatan menunjukkan implementasi dalam program vaksinasi belum berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya komunikasi dengan pihak MUI kabupaten dan kepercayaan masyarakat terhadap kabar negatif terkait vaksin MR akibat pendapat tokoh agama tentang kehalalan vaksin, (Affrian & Walinda, 2020). Di sisi lain, strategi komunikasi yang dilakukan melalui media sosial dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM kesehatan berhasil meningkatkan praktek imunisasi difteri yang dilakukan di Puskesmas Cijedil, Kabupaten Cianjur, (Juhamad & Krianto, 2019). Pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu yang memiliki balita terkait imunisasi difteri mendorong para ibu untuk bersedia mengimunisasi anaknya meskipun masih terdapat pandangan yang kuat terkait keharaman imunisasi. Selain itu, pendekatan agama dan budaya yang dilakukan tokoh agama serta musisi lokal memiliki peran yang penting dalam program Tuberkulosis pada masyarakat daerah pedalaman di Mentawai dan Solok, Sumatera Barat, (Machmud et al., 2020). Musisi tradisional mengemas pesan terkait Tuberkulosis untuk meningkatkan kesadaran akan tanda dan gejala Tuberkulosis dalam permainan Saluang. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan menghibur.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus mengkaji bagaimana dokter di Sumatera Barat menjalankan strategi komunikasi dalam program vaksinasi nasional. Untuk mengetahui strategi komunikasi tersebut, peneliti menggunakan model komunikasi Lasswell, yaitu *who says what in which channel to whom* yang secara umum mengandung 4 unsur komunikasi berupa komunikator, pesan, media, dan komunikan, (Ruslan, 2010). Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah setempat ataupun daerah lain dalam menyusun dan meningkatkan strategi komunikasi dalam program vaksinasi nasional agar dapat berjalan secara efektif ke berbagai kalangan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu pengumpulan dan pengkajian data yang kaya akan informasi secara mendalam dari waktu ke waktu, (Yin, 1994). Terdapat kekhasan tersendiri pada penelitian studi kasus karena adanya batasan, baik tempat, waktu, serta kasus yang diteliti. Penelitian

studi kasus menekankan pada aktivitas dan kejadian ini sehingga peneliti memilih riset ini untuk mengkaji aktivitas yang dilakukan dokter di Sumatera Barat dalam strategi komunikasi pada program vaksinasi nasional.

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Pra penelitian berupa identifikasi masalah, mencari data-data penguat, merancang penelitian yang akan dilakukan, serta menyusun proposal dilakukan peneliti selama satu bulan. Kemudian peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data langsung dari narasumber dengan mewawancarainya yang nantinya data tersebut diolah dan dianalisis.

Narasumber dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Pemilihan informan yang dipilih berdasarkan profesi sebagai dokter di provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam program vaksinasi dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu usia, letak geografis, dan kepercayaan yang dianut. Sebanyak 5 dokter menjadi informan dalam penelitian ini yang terdiri dari dokter muda, dokter senior, dokter kota, dokter kabupaten, dan dokter Islam.

Selain itu, informan pendukung juga terlibat dalam penelitian ini, yakni dinas kesehatan daerah setempat. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama narasumber dilakukan secara daring melalui aplikasi *video conference* untuk menjaga dari penyebaran virus Covid-19. Waktu yang dipilih untuk melakukan wawancara disesuaikan dengan jadwal kerja narasumber. Proses wawancara dilakukan sejak 9 Juni sampai 9 Juli 2021.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, peneliti melakukan analisis data melalui tiga tahap analisis data kualitatif berdasarkan Miles dan Huberman (Pini, 2016) yaitu (1) tahap reduksi data dengan memilih, menyederhanakan, dan memilih data-data yang didapatkan, (2) tahap penyajian data hasil reduksi dilakukan dengan mengambil kesimpulan dan makna yang disusun dalam tabel, dan (3) tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk mendapatkan bukti-bukti konsisten dari kesimpulan awal yang masih sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada lima informan dokter di Sumatera Barat, terkumpul data-data yang menggambarkan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di provinsi Sumatera Barat, penolakan vaksin yang terjadi di masyarakat, strategi komunikasi yang dokter lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi, serta hambatan yang dihadapi dokter dalam menjalani strategi komunikasi tersebut.

Table 1. Daftar Informan Penelitian

Nama	Usia	Posisi	Keterangan
dr. Fitri Yarti	52 tahun	Dokter Senior	Informan 1
dr. Eka Fitriani	32 tahun	Dokter Kabupaten	Informan 2
dr. Nela Haryanti	37 tahun	Dokter Kota	Informan 3
dr. Nova Suryati	27 tahun	Dokter Muda	Informan 4
dr. Silvia	38 tahun	Dokter Muslim	Informan 5
Sesra Yoner	46 tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Agama (informan pendukung)	Informan 6

Menurut informan penelitian ini, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di provinsi Sumatera Barat berjalan alot dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat setempat untuk menerima vaksin serta program vaksinasi belum menjangkau ke berbagai lapisan, khususnya kelompok lansia yang sulit untuk dimasuki.

Selain itu, penolakan vaksin dilakukan masyarakat provinsi Sumatera Barat turut memberikan dampak negatif terhadap jalannya program vaksin. Salah satu informan menilai informasi palsu terkait kandungan dan efek buruk vaksin yang beredar melalui media sosial membuat masyarakat Sumatera Barat enggan untuk divaksin. Masyarakat dengan paham agamanya yang kuat juga adalah mayoritas penolak vaksin dengan meragukan kehalalan kandungan vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan.

Adapun tidak semua masyarakat Sumatera Barat menolak seluruh merek vaksin COVID-19. Dua informan menyebut bahwa Sinovac adalah jenis vaksin yang lebih diterima masyarakat Sumatera Barat karena informasi buruk terkait efek samping vaksin yang ada di media sosial bukan merujuk kepada vaksin Sinovac. Penolakan vaksin yang membuat tingkat capaian vaksinasi di Sumatera Barat rendah ini mendorong seluruh informan untuk

melakukan strategi komunikasi dalam berbagai pendekatan. Strategi dilakukan dengan mempertimbangkan audiens dan situasi yang dihadapi saat melakukan promosi program vaksinasi.

Pendekatan Agama dan Sosial Budaya dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi

Untuk meyakinkan masyarakat Sumatera Barat yang dikenal religius dan lekat dengan nilai budaya agar bersedia untuk divaksin, dokter menggunakan pendekatan agama dalam melakukan strategi komunikasi. Pendekatan agama dilakukan dengan menyajikan narasi bahwa vaksin halal dan aman digunakan karena masih adanya anggapan di masyarakat Sumatera Barat bahwa vaksin mengandung babi. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi rujukan dalam pelaksanaan program vaksinasi kepada masyarakat.

“Kalau dari pandangan agama yang tentunya masyarakat lebih percaya dari perkataan agama, karena itu kita juga lebih berpegang kepada fatwa MUI mengenai vaksinasi. Ungkap informan 1”

Sebagai bentuk legalitas jaminan kehalalan dan penggunaan vaksin Covid-19, MUI mengeluarkan dua fatwa berbeda, yaitu Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) (Majelis Ulama Indonesia, 2021a) dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, (Majelis Ulama Indonesia, 2021b). Dalam kedua fatwa tersebut, MUI memutuskan untuk memperbolehkan penggunaan vaksin Covid-19 saat ini untuk kebutuhan yang mendesak, meskipun pada vaksin produk AstraZeneca memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi dalam proses produksinya.

Selain dengan menggunakan fatwa MUI sebagai rujukan dalam pelaksanaan program vaksinasi melalui pendekatan agama, dokter lain melakukan negosiasi dengan ulama sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat dan meminta testimoni bagi ulama yang sudah mendapatkan vaksinasi dengan tujuan untuk mengajak masyarakat yang belum divaksin. Dalam kedua fatwa tersebut, MUI

“Jika masalahnya ada pada ulama, maka kita melakukan pendekatan dan negosiasi dengan ulama tersebut. Sampai akhirnya ulama itu melakukan vaksin dan setelah itu kita minta testimoni mereka (ulama) dan testimoni itulah yang kita sebar kepada masyarakat, Ungkap Informan 3”

Keterlibatan tokoh agama dalam program kesehatan secara positif dapat mendorong partisipasi pengikutnya sehingga meningkatkan hasil kesehatan yang baik dengan mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan para pengikut melalui pesan-pesan agama yang disebarkan secara konsisten, (Jill et al., 2015). Masyarakat dengan konteks budaya tinggi (*high context culture*) akan lebih percaya dengan narasi-narasi yang dibawa oleh tokoh agama karena nilai spiritualitas digunakan sebagai konsep berpikir dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, (Amin et al., 2020).

Tokoh masyarakat turut serta dalam program vaksinasi melalui pendekatan sosial budaya. Dalam pendekatan ini, dokter mengedukasi para tokoh masyarakat yang nantinya informasi seputar vaksin dapat kembali disebarkan kepada pengikutnya.

“Kemudian juga pendekatan sosial budaya kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti ke kader nagari, RT, RW, guru sekolah, *inyiak-inyiak* (kakek-kakek), *niniak mamak* (penghulu adat), atau tokoh masyarakat lainnya yang disegani karena masyarakat lebih percaya ke tokoh masyarakat yang disegani dengan mengedukasi mereka, Ungkap Informan 4”

Tokoh masyarakat dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimilikinya biasanya akan diikuti orang lain karena dianggap sebagai panutan yang dihormati dan disegani. Tokoh masyarakat memiliki peran sebagai penjaga, pengendali, serta penegak norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi ini, tokoh masyarakat berperan aktif dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, (Rosidin et al., 2020).

Di samping mensosialisasikan vaksin kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, informan tambahan melakukan sosialisasi langsung ke kantor desa setempat ketika promosi program vaksinasi yang dilakukan dokter belum menunjukkan hasil.

“Iya kadang kita melakukan sosialisasi vaksin ke kantor desa setempat, lalu esok hari ketika di *follow up* pejabat desa tidak ada, hanya kepalanya saja, Ungkap Informan Dinas Kesehatan”

Media yang Digunakan dalam Program Vaksinasi

Media menjadi unsur penting dalam penyampaian dan penyebaran berbagai pesan. Di masa pandemi Covid-19, media memiliki peran yang krusial untuk menyuguhkan informasi seputar vaksinasi dan kesehatan secara umum. Pemilihan media dalam penyampaian informasi vaksinasi perlu disesuaikan dengan budaya, sikap, dan perilaku masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami masyarakat dari berbagai kalangan.

Dalam penelitian ini, para informan memanfaatkan berbagai media yang berbeda dalam melakukan strategi komunikasi program vaksinasi. Satu informan menggunakan akun Facebook puskesmas tempat ia bertugas.

“Kita menggunakan akun facebook puskesmas untuk menyebarkan informasi. Bentuknya kita *share* berupa video, mengajak lewat status, dan lain-lain, Ungkap Informan 5”

Pandemi yang melanda dunia saat ini mendorong peningkatan penggunaan media sosial dalam dunia kesehatan. Media sosial memiliki manfaat untuk berkomunikasi seputar masalah kesehatan dengan pengguna lain, serta dapat mendistribusikan informasi kesehatan secara luas, (Wong et al., 2021).

Selain memanfaatkan media sosial, informan juga melakukan strategi komunikasi melalui media massa berupa poster yang berisi informasi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

“Pernah pakai pendekatan agama dengan memasang poster 3M untuk dipasang di masjid karena orang disini sering ke masjid, Ungkap Informan 4”

Penggunaan poster dinilai cukup baik dalam mengedukasi masyarakat seputar protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19. Dalam hal ini, poster perlu dikemas dengan desain yang menarik dan informasi yang mudah dipahami sehingga penggunaan poster tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (Masruroh & Hayati, 2021).

Serupa dengan pernyataan informan 4, informan juga memanfaatkan media massa dan mobil kamtibmas untuk mengajak masyarakat di daerah terpencil untuk ikut serta dalam program vaksinasi.

“Kampanye melalui berbagai saluran, melalui televisi, tulisan-tulisan akademisi yang dicantumkan di koran, corong-corong masjid, dan bahkan mobil-mobil kamtibmas turut menuju daerah-daerah terpencil untuk mengajak orang vaksinasi dan menjemput sasaran tertentu, Ungkap Informan 3”

Seperti yang dilakukan informan 3, informan 5 dalam melakukan strategi komunikasi memanfaatkan mobil ambulans untuk menayangkan video edukasi kepada masyarakat.

“Kalau kampanye saya hanya melakukan kampanye umum, beri edukasi vaksinasi seperti sosialisasi, buat rekam video lalu diputar di ambulance keliling, Ungkap Informan 5”

Lain halnya dengan yang dilakukan oleh informan 5, beberapa informan melakukan komunikasi interpersonal kepada masyarakat. Informan 2 memilih untuk berkomunikasi secara personal karena ia tidak terlibat langsung dalam tugas promosi kesehatan.

“Kalau saya tidak turun langsung ke masyarakat karena biasanya itu tugasnya dari promosi kesehatan. Jadi kalau saya lebih ke personal dengan komunikasi yang baik-baik begitu.” (Informan 2, Dokter Kabupaten)

Hal serupa juga dilakukan oleh informan 1 yang menurutnya, dalam melakukan strategi komunikasi perlu bertatap muka dengan orang-orang di lapangan.

“Cara mengkomunikasikan adalah hal yang paling penting. Di Sumatera Barat giatnya bukan himbauan, tapi harus turun ke lapangan, kemudian dipanggil apakah itu pejabat desa, ninik mamak (kepala suku), dan aparat keamanan, Ungkap Informan 1”

Dalam memutuskan pilihan apakah seseorang bersedia untuk menerima vaksin atau tidak, penyedia layanan kesehatan menjadi sumber utama untuk memberikan informasi dan rekomendasi. Keberhasilan penyedia layanan kesehatan dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan pasiennya agar bersedia untuk divaksin hampir sebagian besar ditentukan oleh pesan yang mengandung makna bahwa vaksin akan melindungi kesehatan personal individu dibandingkan dengan kesehatan masyarakat luas, (Heiss et al., 2015).

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi

Dalam melakukan promosi program vaksinasi, para dokter menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal disebabkan dari kekurangan jumlah tenaga medis yang turut serta dalam penyuluhan kepada masyarakat karena meningkatnya partisipasi masyarakat untuk divaksin yang membuat banyak tenaga medis dialihkan dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Karena orang yang divaksin sudah mulai banyak, tentu tenaga medis yang *standby* pun harus banyak juga. Sehingga yang bertugas untuk melakukan penyuluhan ke lapangan jadi berkurang, Ungkap Informan 3”

Untuk menghadapi hambatan tersebut, pihak-pihak lain, seperti Babinsa dan Kamtibmas turut serta dilibatkan ke lapangan untuk melakukan edukasi vaksinasi sekaligus menjemput masyarakat agar bersedia untuk divaksin.

“Sekarang hambatan itu disikapi dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti babinsa-babinsa kamtibmas yang ke lapangan untuk melakukan edukasi dan melakukan penjemputan ke sasaran target, Ungkap Informan”

Jika hambatan internal berasal dari tenaga medis, maka hambatan eksternal datang dari masyarakat setempat. Salah satu dokter mengakui bahwa hambatan datang dari tokoh masyarakat yang pada dasarnya tidak percaya dengan vaksin walau sudah diberikan edukasi.

“Sudah melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, tetapi sayangnya tokoh masyarakatnya pun memang tidak percaya dengan vaksin. Ungkap Informan 4”

Walaupun penolakan terus terjadi, dr. Nova tetap meyakinkan penolak vaksin dengan menantang mereka untuk membuktikan kebenaran efek negatif dari vaksin. Tidak hanya itu, dr. Nova mendatangi langsung masyarakat yang malas untuk divaksin di puskesmas.

“Saya tetap berusaha meyakinkan dengan menantang penolak vaksin untuk membuktikan pernyataannya terkait dampak negatif vaksin benar atau tidak. Saya juga memberikan solusi untuk mendatangi langsung masyarakat yang malas untuk datang ke puskesmas agar mau divaksin, Ungkap Informan 4”

Serupa dengan pernyataan informan 4, hambatan yang dihadapi oleh informan 2 berupa rasa takut masyarakat akan efek samping vaksinasi. Untuk menghadapinya, ia meluruskan informasi bohong atau hoaks karena sudah menjadi tugasnya sebagai tenaga medis.

“Jelasin lagi, ya tugas nakes ya meluruskan banyaknya berita hoax, dulu karena informasinya dari mulut ke mulut, sekarang lebih banyak, Ungkap Informan 2”

Hambatan lain turut dirasakan oleh informan 5. Ia merasa cukup kelelahan dengan kurangnya antusiasme masyarakat untuk divaksin meskipun sudah dilakukan sosialisasi.

“Cukup cape juga sih pas di awal-awal sosialisasi tapi yang datang vaksin 10-20 orang, Ungkap Informan 5”

Meskipun masih terdapat masyarakat yang enggan untuk divaksin, informan 5 tidak memaksakan kehendak para penolak vaksin. Ia menanggapi hal penolakan tersebut dengan memberikan penjelasan tanpa memaksa dan melaporkan kondisi tersebut kepada atasannya.

“Kami tidak bisa memaksa. Kami cukup memberi penjelasan, kalau mau menerima atau tidak dikembalikan kepada mereka. Kita hanya menyampaikan dan melaporkan pada atasan bahwa di lapangan seperti ini, Ungkap Informan 5”

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan tenaga kesehatan pada masyarakat di Sumatera Barat, hakikatnya tidak selalu berjalan dengan tanpa menemukan hambatan. Bahkan kaitannya dengan proses komunikasi yang efektif beberapa ahli mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar efektif, (Komariah & Subekti, 2016). Temuan di atas menunjukkan bahwa dokter mendapatkan dua jenis hambatan, pertama hambatan internal, kedua hambatan eksternal.

Hambatan internal terjadi pada diri dokter atau tenaga kesehatan yang bertindak sebagai komunikator. Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat proses komunikasi. Pada situasi program vaksinasi nasional di masa pandemi Covid-19, dokter memiliki beberapa tugas, diantaranya menyuntikan vaksin, melakukan edukasi pada masyarakat, dan melawan penyebaran informasi *hoax*. Sehingga kurangnya sumber daya manusia membuat upaya edukasi dokter pada masyarakat di Sumatera Barat menjadi terhambat.

Hambatan eksternal muncul dari masyarakat sebagai komunikan dan banyaknya informasi *hoax* yang tersebar pada masyarakat. Proses sosialisasi dan edukasi terhambat karena adanya kesulitan komunikasi, pola kelakuan yang berbeda dan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, (Komariah & Subekti, 2016). Karakteristik masyarakat yang mudah terpengaruh dengan informasi *hoax* membuat upaya dokter dalam mengedukasi masyarakat mendapat respon yang tidak begitu baik bahkan terjadi penolakan. Effendy (2003) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk gangguan atau *noise* dalam komunikasi yakni adanya prasangka. Prasangka atau *prejudice* merupakan sikap seseorang terhadap sesuatu yang terbagi ke dalam dua alternatif antara *like and dislike*, atau pun simpati dan tidak simpati. Terdapat kelompok masyarakat di Sumatera Barat yang antipati dengan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, ditambah dengan adanya *hoax*, membuat berbagai pesan serta ajakan untuk vaksinasi menjadi terhambat.

KESIMPULAN

Rendahnya tingkat vaksinasi di provinsi Sumatera Barat terjadi karena adanya penolakan vaksin. Penolakan vaksin tentunya akan memberikan dampak di berbagai lini kehidupan. Dari segi kesehatan, virus Covid-19 akan terus menyebar dan *herd immunity* atau kekebalan kelompok tidak akan tercapai apabila banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Selain itu, pemulihan ekonomi akan terhambat yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dampak-dampak tersebut menjadi pengingat bahwa vaksinasi perlu terus digalakkan ke berbagai lapisan masyarakat seiring dengan edukasi tentang vaksin. Dalam hal ini, kehadiran dokter sebagai tenaga medis sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program vaksinasi nasional melalui strategi komunikasi. Banyak faktor yang mendasari penolakan vaksin yang terjadi di masyarakat Sumatera Barat mulai dari keamanan, efektifitas, efek samping, dan kehalalan kandungan vaksin Covid-19.

Pada artikel ini kami menemukan pola strategi komunikasi yang dilakukan oleh dokter di Sumatera Barat untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional di masa pandemi Covid-19. Para informan dalam penelitian ini mengaku bahwa program vaksinasi di Sumatera Barat berjalan lambat dan belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya antusiasme dari masyarakat. Banyak masyarakat masih percaya dengan kabar bohong terkait kandungan dan efek samping vaksin yang beredar di media sosial, sehingga membuat mereka menolak untuk divaksin. Masyarakat religius Sumatera Barat juga meragukan kehalalan jenis vaksin yang digunakan. Hal ini membuat para informan menggunakan pendekatan agama dan budaya dalam strategi komunikasi.

Informan menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pendekatan agama sebagai bukti bahwa vaksin yang saat ini digunakan boleh dipergunakan dalam konteks keadaan darurat walau terdapat kandungan babi di salah satu jenis vaksin Covid-19. Informan juga melakukan komunikasi langsung dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti *inyiak-inyiak* (kakek-kakek) dan *niniak mamak* (penghulu adat) mengingatkan masyarakat Sumatera

Barat masih kental dengan nilai-nilai agama dan budaya. Di sisi lain, informan tambahan, yakni Dinas Kesehatan, juga turut serta melakukan sosialisasi vaksinasi secara langsung kepada kepala desa ketika sosialisasi yang dilakukan dokter dirasa belum mencapai target.

Dalam melakukan strategi komunikasi program vaksinasi, para informan menggunakan berbagai media, seperti media sosial melalui akun Facebook puskesmas dan media massa dengan memasang poster berisi informasi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Di samping memanfaatkan penggunaan media, informan juga melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat di berbagai tempat, termasuk daerah-daerah terpencil menggunakan mobil kamtibmas.

Strategi komunikasi program vaksinasi yang dilakukan informan seringkali menghadapi hambatan internal maupun eksternal. Kurangnya personil tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam penyuluhan vaksinasi menjadi hambatan internal yang dihadapi dokter sehingga untuk mengatasinya, informan melibatkan lembaga-lembaga lain. Hambatan lain yang dihadapi informan adalah masih terdapat keengganan masyarakat untuk divaksin dan ketidakpercayaan tokoh masyarakat terhadap vaksin meskipun telah diberikan edukasi. Meskipun demikian, ada informan yang tetap memberikan edukasi dan informan lain tidak memaksa masyarakat yang tetap tidak bersedia divaksin.

Pada dasarnya penelitian ini hanya berfokus pada strategi komunikasi. Penelitian ke depan akan sangat penting bila mengkaji dari sisi efektivitas strategi komunikasi yang digunakan tenaga kesehatan dalam meningkatkan partisipasi program vaksinasi nasional. Tentunya dengan menggunakan data kuantitatif agar dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari strategi yang digunakan oleh tenaga kesehatan.

REFERENSI

- Affrian, R., & Walinda, R. (2020). Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.46730/JAPS.V1I1.13>
- Amin, M., Saleh, Akh. M., & Bilfaqih, H. Z. A. (2020). *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial, dan Agama* (1st ed.). PT. Cita Intrans Selaras.
- Candra, S. A. (2019, January). *Realisasi Imunisasi MR di Sumbar Rendah*.
- Finney Rutten, L. J., Zhu, X., Leppin, A. L., Ridgeway, J. L., Swift, M. D., Griffin, J. M., St Sauver, J. L., Virk, A., & Jacobson, R. M. (2021). Evidence-Based Strategies for Clinical Organizations to Address COVID-19 Vaccine Hesitancy. *Mayo Clinic Proceedings*, 96(3), 699–707. <https://doi.org/10.1016/J.MAYOCP.2020.12.024>
- Habibah Gaffar, U. (2022). REALISASI VAKSINASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF AGILE GOVERNANCE. *Politik Dan Pemerintahan*, 11. <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Harapan, H., Wagner, A. L., Yufika, A., Winardi, W., Anwar, S., Gan, A. K., Setiawan, A. M., Rajamoorthy, Y., Sofyan, H., & Mudatsir, M. (2020). Acceptance of a COVID-19 Vaccine in Southeast Asia: A Cross-Sectional Study in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 8(July), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00381>
- Harlina, N. (2021, June). *Angka Vaksinasi Covid-19 Sumbar Termasuk yang Terendah di Indonesia, Ada Apa? - Regional Liputan6.com*.
- Heiss, S. N., Carmack, H. J., & Chadwick, A. E. (2015). Effects of interpersonal communication, knowledge, and attitudes on pertussis vaccination in Vermont. *Journal of Communication in Healthcare*, 8(3), 207–219. <https://doi.org/10.1179/1753807615Y.0000000012>
- Hendra, M. (2019, January). *Capaian Imunisasi MR 2018 di Sumbar Hanya 41 Persen*.
- Husain, A. H. al. (2020). Komunikasi Kesehatan Dokter dan Pasien Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 126. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i2.3546>
- Indikator Politik Indonesia. (2021). *Siapa Enggan Divaksin? Tantangan Dan Problem Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia*.
- Jill, O., Clarence, T., Regina, G., Mari, S., Harold, C., Frank, D., MC, N., Harrison, H., EJ, M., JL, D., Annie, H., & Quentin, W. (2015). Understanding the roles of faith-based health-care providers in Africa: review of the evidence with a focus on magnitude, reach, cost, and satisfaction. *Lancet (London, England)*, 386(10005), 1765–1775. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60251-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60251-3)
- Juhamad, J., & Krianto, T. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PENINGKATAN PRAKTEK IMUNISASI DIFTERI PADA IBU BALITA DI PUSKESMAS CIJEDIL, DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 11(2), 115–123. <https://doi.org/10.37012/JIK.V11I2.76>
- Kemenkes RI. (2021). *FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ): SEPUTAR PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19*.
- Kementerian Kesehatan RI, ITAGI, UNICEF, & WHO. (2020). *Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia* (Issue November).

- Komariah, K., & Subekti, P. (2016). PENGGUNAAN MEDIA MASSA SEBAGAI AGEN SOSIALISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA IMUNISASI. *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.24198/prh.v1i1.9502>
- Kuwardo, F. J. (2018). *Program Imunisasi MR Terancam Gagal*.
- Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Rilis Hasil Survei Nasional: Sikap Publik terhadap Vaksin dan Program Vaksin Pemerintah* (Issue 40).
- Littlemore, J. (2003). The communicative effectiveness of different types of communication strategy. *System*, 31(3), 331–347. [https://doi.org/10.1016/S0346-251X\(03\)00046-0](https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00046-0)
- Machmud, R., Medison, I., & Yani, F. F. (2020). Cultural and religious belief approaches of a tuberculosis program for hard-to-reach populations in mentawai and solok, west sumatera, Indonesia. *Kesmas*, 15(4), 205–211. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I4.3374>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021a). *Fatwa MUI No 02 Tabun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021b). *Fatwa Nomor 14 Tabun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca – Majelis Ulama Indonesia*.
- Masruroh, M., & Hayati, N. (2021). Media poster sebagai sarana edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan covid-19. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(2), 169. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i2.9207>
- Nkanunye, C. C., & Obiechina, G. O. (2017). Health Communication Strategies as Gateway to Effective Health Promotion and Well-being. *Journal of Medical Research and Health Education*, 1(3), 1–4.
- Nurdiana, A., Marlina, R., & Adityasning, W. (2021). Berantas Hoax Seputar Vaksin Covid-19 Melalui Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Vaksin Covid-19. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1175>
- Pini, B. (2016). *Qualitative Data Analysis*. Griffith University.
- Rahayuwati, R. (2021). PENOLAKAN VAKSINASI: IMAJINASI MORAL DAN PERAN MEDIA SOSIAL. *HUMANIKA*, 28(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.v28i2.39912>
- Rosidin, U., Rahayuwati, L., & Herawati, E. (2020). Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. *Umbara*, 5(1), 42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i1.28187>
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU. (2021). Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia. *Jakarta*.
- Victoria, A. O. (2021, April). *Sri Muhyani: Indonesia Merugi Rp 1.356 Triliun Akibat Pandemi Covid-19*.
- Wong, A., Ho, S., Olusanya, O., Antonini, M. V., & Lyness, D. (2021). The use of social media and online communications in times of pandemic COVID-19. *Journal of the Intensive Care Society*, 22(3), 255–260. <https://doi.org/10.1177/1751143720966280>
- Yin, R. K. (1994). *Case Study Research: Design And Methods (Applied Social Research Methods Series Vol. 5)*. SAGE Publications.